

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang memiliki visi misi yang bertujuan yang sama untuk mencapai suatu yang sudah di rencanakan dan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

Terselenggaranya *good government governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. *Good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, (Halim, 2007: 81, Diana Sari, 2012).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good government governance*, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk

mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal), (Mahmudi, 2010:23).

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi dilakukannya *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk *horizontal accountability*. Diantara permasalahan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah yaitu lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2008).

Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam *Concept Statement No. 1 tentang Objective of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan, bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai

pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja (Mardiasmo, 2010:32).

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik (Mardiasmo, 2009:20).

Pengelolaan keuangan daerah juga harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Sedangkan transparansi adalah *memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan* (PP.No.24 :2005).

Prinsip pengendalian internal yang baik menurut para ahli adalah sebaiknya jangan ada suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh satu orang. Ada 3 fungsi yang harus terpisahkan agar aktivitas pengendalian dapat berfungsi dengan baik, yaitu : (1) Fungsi Pencatatan ; (2) Fungsi Penyimpanan; dan (3) Fungsi Operasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menurut Mulyana (Primayani, 2014) adalah (1) penyajian laporan keuangan sesuai SAP dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK dan komitmen untuk memantau pelaksanaan SPI, (2) Pengendalian Internal terutama pengendalian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, (3) Pemeriksaan keuangan oleh BPK RI terutama terkait dengan koreksi yang disampaikan oleh BPK RI agar LKPD disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Pemerintahan Kabupaten Indragirihulu selama 8 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2007 sampai 2015 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dengan adanya opini tersebut, maka sangat diperlukan adanya peningkatan akuntabilitas publik yang tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Negara.

Faktor pertama, yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu pengendalian intern (Mardiasmo dalam Primayani, 2014). Pengendalian yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai, sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Faktor kedua, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu *value for money*. Semakin pesatnya perkembangan dalam dunia usaha, menyebabkan persaingan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya akuntabilitas publik pada perusahaan publik dan semakin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi publik dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan. Untuk mencapai akuntabilitas publik yang baik dengan digunakannya pengukuran kinerja *value for money*. Seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2010:121) bahwa akuntabilitas publik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*).

Faktor ketiga, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah

daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Faktor keempat, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu aksebilitas laporan keuangan. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2009). Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah.

Untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan menuju WTP, kegiatan pengawasan BPKP difokuskan pada penyelesaian permasalahan antara lain berupa pengelolaan barang milik Negara/daerah, pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui asistensi penyusunan *Action*

Plan atas hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK, dan melakukan verifikasi piutang PBBB-P2 serta penguasaan pegawai ke instansi Vertikal dan Pemda.

Saufi Iqbal Nasution (2009) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh penyajian neraca SKPD dan akseibilitas pengelolaan keuangan SKPD transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di pemerintah provinsi Sumatra Utara”. Hasil penelitiannya menyatakan variabel akseibilitas laporan keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di pemerintahan memiliki hubungan yang erat.

Reni Rafita Sari (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Siak”. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

Putu Riana Primayani (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pengendalian internal, *value for money*, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung”. Hasil penelitiannya menyatakan semua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putu Riana Primayani (2014), perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Pada penelitian Putu Riana Primayani (2014) menggunakan empat variabel independen dan objek penelitian dilakukan di

Pemerintahan Kabupaten Klungkung, sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan objek penelitian dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Alasan mengapa Kabupaten Indragiri Hulu menarik untuk diteliti, yaitu hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) selalu memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP diberikan karena terdapat beberapa temuan dalam LKPD. Salah satunya adalah BPK RI menemukan permasalahan yang terkait mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern diantaranya adalah penyertaan modal kepada PD Indragiri berupa aset tidak dapat diyakini kewajarannya, piutang PBB Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2003 belum divalidasi, saldo investasi dana bergulir tidak dapat diyakini kewajarannya dan mengalami kemacetan. Permasalahan lain terkait ketidakpastian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain kas daerah yang tidak dikuasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, salah penganggaran atas belanja hibah dan kelebihan pemberian hibah dari ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengembangkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Intern, Value For Money dan penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Inhu.
2. Bagaimana *Value For Money* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Inhu.
3. Bagaimana penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Inhu.
4. Bagaimana pengendalian intern, *value for money*, penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Inhu.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Inhu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Inhu.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengendalian Intern dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan secara bersama-sama (simultan).

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi khususnya Pengaruh Pengendalian Intern, *Value For Money* dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan fungsi pemerintah, khususnya dalam hal kinerja pemerintah daerah agar dapat ditingkatkan lagi.

c. Bagi peneliti lain dimasa yang akan datang

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan dan penelitian selanjutnya dikabupaten atau kota lain di Indonesia dan kegunaantersebut dapat berdampak baik bersifat praktis maupun teoritis.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan landasan teoro-teori pendukung sebagai kerangka pemikiran atau telaah pustaka bagi penulis dalam melakukan analisis dan membuat hipotesis.

BAB III :METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang populasi dan metode pengambilan sampel, identifikasi, dan pengukuran variabel, metode pengumpulan, teknis analisis data dan pengujian hipotesis

BAB VI :GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian.

BAB V :HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas hasil analisis hasil penelitian dan pembahasannya yang mencakup mengenai deskripsi dan analisis data, statistik deskriptif variabel, pengujian kualitas data, pengujian normalitas data, penentuan model penelitian yang digunakan, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB VI :PENUTUP

Bab ini berikan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dirangkum dari hasil penelitian ini.